SLAMET BEGJO TERIMA PENGHARGAAN ‘ANUGERAH BUKU LAYANAN DASAR BANUA’ OLEH OMBUDSMAN RI

Senin, 30 Juni 2025 - kalsel

BANJARMASIN - Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo, menerima penghargaan bergengsi dalam kegiatan 'Penganugerahan Buku Layanan Dasar Banua' yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Kamis, (26/6).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif Dishub Banjarmasin dalam menyusun tulisan bertajuk 'Perlengkapan Jalan di Kota Banjarmasin' yang menjadi bagian dalam buku kompilasi sebagai rujukan pelaksanaan layanan dasar di wilayah Kalimantan Selatan.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai kepala perangkat daerah, pimpinan lembaga pelayanan publik, akademisi, dan mitra Ombudsman Kalsel. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Slamet Begjo.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, terutama layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi.

"Kami berharap tulisan ini bisa menjadi bagian dari edukasi publik, sekaligus menjadi rujukan bagi instansi lainnya dalam menyusun dan mengelola perlengkapan jalan yang aman, fungsional, dan berstandar," ujar Slamet.

Pihaknya juga menegaskan bahwa keikutsertaan Dishub dalam buku ini bukan sekadar kontribusi dokumentasi, melainkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi di Kota Banjarmasin.

Buku "Layanan Dasar Banua" yang diluncurkan oleh Ombudsman RI Kalsel memuat berbagai artikel dan tulisan dari pejabat serta praktisi pelayanan publik. Buku ini berfokus pada praktik baik (best practices) dan solusi konkret pelayanan dasar yang bisa direplikasi di daerah lain.

Melalui penghargaan ini, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berharap terus mengembangkan inovasi dan konsistensi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur jalan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Ombudsman dan pemerintah daerah dalam mendorong pelayanan publik yang adil, merata, dan berkualitas di Kalimantan Selatan.